

**PENGARUH KARAKTERISTIK DESA TERHADAP  
EFISIENSI KEUANGAN DESA DI LAMPUNG**

**(Tesis)**

**Oleh**

**FITRI INDAYANI**



**MAGISTER ILMU AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2017**

## **ABSTRAK**

### **PENGARUH KARAKTERISTIK DESA TERHADAP EFISIENSI KEUANGAN DESA DI LAMPUNG**

Oleh

Fitri Indayani

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh karakteristik desa terhadap efisiensi keuangan desa di Lampung. Pada penelitian ini karakteristik desa diprosikan dengan ukuran desa, tingkat kekayaan dan tingkat ketergantungan.

Pengambilan sampel pada penelitian ini dengan kriteria berdasarkan Indeks Kemajuan Desa (IKD). Periode data diambil selama 2 tahun yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 pada desa tiap Kabupaten di Provinsi Lampung. Jumlah sampel 108 desa maju dan 272 desa berkembang sehingga data penelitian yang digunakan sebanyak 760 data observasi. Analisis data dilakukan dengan analisis data panel dan pengolahan data penelitian dengan menggunakan alat uji statistik *Eviews 9*.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran berpengaruh negatif signifikan, variabel tingkat kekayaan tidak berpengaruh dan variabel tingkat ketergantungan berpengaruh positif signifikan terhadap efisiensi keuangan desa.

**Kata kunci: efisiensi, ukuran, tingkat kekayaan dan tingkat ketergantungan**

## **ABSTRACT**

### **THE INFLUNCE OF VILLAGE CHARACTERISTICS TOWARDS THE EFICIENCY OF VILLAGE FINANCE IN LAMPUNG**

By

*Fitri Indayani*

*This study is purpose to obtain empirical evidence of the influence of village characteristics towards the village financial efficiency in Lampung. In this study the characteristics of the village are proxied with the size of the village, the level of wealth and the level of dependence.*

*Sampling criteria in this study with based on Village Progress Index (IKD). Period of data was taken for 2 years from 2015 until 2016 in the village of each district in Lampung Province. The number of samples consist of 108 developed villages and 272 developing villages so that the research data which is used about 760 observation data. Data analysis was conducted by panel data analysis and the processing of data research is using Eviews 9 statistical test.*

*Based on the results of this study indicate that the variable size has a significant negative effect, the variable level of wealth has no effect and variable the level of dependence has a significant positive effect towards the village financial efficiency.*

***Keywords: efficiency, size, level of wealth and level of dependence***

**PENGARUH KARAKTERISTIK DESA TERHADAP  
EFISIENSI KEUANGAN DESA DI LAMPUNG**

**Oleh**

**FITRI INDAYANI**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER SAINS AKUNTANSI**

**Pada**

**Magister Ilmu Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**MAGISTER ILMU AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

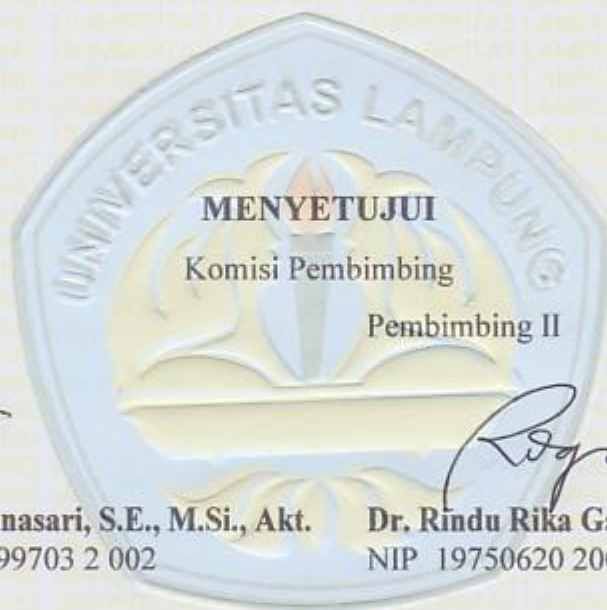
Judul Tesis : **PENGARUH KARAKTERISTIK DESA  
TERHADAP EFISIENSI KEUANGAN DESA  
DI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **FITRI INDAYANI**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1521031034

Program Studi : Magister Ilmu Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Pembimbing I

**Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt.**  
NIP 19700817 199703 2 002

Pembimbing II

**Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.**  
NIP 19750620 200012 2 001

Ketua Program Magister Ilmu Akuntansi

**Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.**  
NIP 19750620 200012 2 001



MENGESAHKAN

1. Tim Penguji :

Ketua : Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt. ....

Sekretaris : Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si. ....

Penguji Utama : Dr. Nurdiono, S.E., M.M., C.A., C.P.A. ....

Sekretaris Penguji : Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt. ....



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.  
NIP 19610904 198703 1 011

3. Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.  
NIP 19530528 198103 1 002

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 4 Desember 2017

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Indayani

NPM : 1521031034

Jurusan/Program Studi : Magister Ilmu Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari peniruan terhadap karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain dirujuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Bandar Lampung, 04 Desember 2017

Yang membuat pernyataan,



Fitri Indayani

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 16 Juli 1983 yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Djufri Fadjoni, S.Ag. dan Ibu Nurma Erleni, S.Pd.

Pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis yaitu Taman Kanak-anak PGRI Semuli Jaya Lampung Utara, SDN 01 Semuli Jaya Lampung Utara lulus tahun 1995, SLTP Al-Kautsar Bandar Lampung lulus tahun 1998 dan SMU Al-Kautsar Bandar Lampung lulus tahun 2001. Penulis melanjutkan pendidikan tinggi strata 1 di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dan lulus pada tahun 2006.

Penulis diterima bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2011 dan saat ini ditempatkan sebagai staff Sub Bagian Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung. Pada tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa pascasarjana pada program studi Magister Ilmu Akuntansi di Universitas Lampung melalui jalur seleksi Beasiswa STAR BPKP.



## MOTTO

*Fa-inna ma'al'usri yusran. Inna ma'al'usri yusran. Fa-idzaa faraghta faanshab.*

Karena sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari satu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.

(Q.S. Al-Insyirah 5-7)

Kisah terbaik adalah kisah yang berliku-liku.

Cerita terbaik adalah hidup yang berwarna-warni.

Bukankah iman itu memang setengahnya adalah syukur dan separuhnya adalah sabar?

(Salim A. Fillah)

## SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillahillahi robbil'alamiin. Puji syukur atas segala nikmat yang telah Allah SWT limpahkan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada nabi junjungan kita Muhammad SAW, sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Tesis yang berjudul "**Pengaruh Karakteristik Desa Terhadap Efisiensi Keuangan Desa Di Lampung**" merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Tesis ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu peneliti membuka saran, masukan, dan kritikan yang dapat digunakan untuk memperbaiki riset ini untuk riset berikutnya.

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
2. Ibu Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung juga selaku Pembimbing Kedua, atas segala diskusi, motivasi dan kesabaran yang sangat membantu dalam penyusunan tesis ini;
3. Ibu Yunia Amelia, S.E., M.Sc.Ak. C.A., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini;

4. Ibu Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt., selaku Pembimbing Utama, atas segala masukan, saran, motivasi dan ilmu yang sangat membantu selama proses penyusunan tesis ini;
5. Bapak Dr. Nurdiono, S.E., M.M., Akt. C.P.A. selaku Penguji Utama, atas segala saran dan masukan yang sangat membantu dalam penyusunan tesis ini;
6. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt., selaku Sekretaris Penguji, atas segala saran yang sangat membantu dalam penyempurnaan tesis ini;
7. Keluarga besar Bapak Djufri Fadjoni, S.Ag. dan Bapak Muchammad Machdor, S.E., atas segala doa, dukungan dan motivasi tak terhingga dalam penyusunan tesis ini;
8. Suamiku Ginanjar Wahyudi, S.A.N., anak-anakku Hanifa Shafaa Haura, Annida Dhuha Fadiyah dan Muhammad Ghazy Al Faruq, atas segala doa, dukungan, motivasi, pengertian dan kesabaran selama menyusun tesis ini;
9. Teman-teman seperjuangan di Batch III MIA STAR BPKP: Dik Tika, Dik Ina, Minan Dewi, Mba Erna, Mba Yeyen, Pak Didik, Mung Suratno, Mas Damar, Mas Anggie, Pak Artha, Mr. Wahono, Mas Heru, Pak Wasis, Mas Hayat dan Pak Mufid. Teman-teman Batch I dan II MIA STAR BPKP. Teman-teman reguler: Ina, Mba Tanti, Ayin dan lainnya, atas kerjasama juga kebersamaan selama ini dan semangat yang selalu kalian berikan;
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung, khususnya Bapak Drs. Yuda Setiawan, M.M., atas ijin yang diberikan sehingga penulis bisa mengikuti tugas belajar;

11. Teman-teman sejawat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung yang telah membantu dalam menyajikan data pendukung pada penelitian ini;
12. Mas Andri, Mba Leni dan Nico serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas semua bantuan dan kerjasamanya.

Demikian kiranya yang dapat peneliti sampaikan. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Semoga pembaca sekalian dapat memperoleh manfaat dari tesis ini. Terimakasih.

Bandar Lampung, Desember 2017

Peneliti

Fitri Indayani

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian .....	10
1.4. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
2.1. Landasan Teori .....	11
2.1.1. Teori Kontingensi Struktural ( <i>Structure Contingency Theory</i> ).....	11
2.1.2. Efisiensi .....	12
2.1.3. Karakteristik Desa .....	13
2.1.3.1. Ukuran .....	14
2.1.3.2. Tingkat Kekayaan .....	15
2.1.3.3. Tingkat Ketergantungan .....	17
2.1.4. Keuangan Desa.....	18
2.2. Review Penelitian Terdahulu.....	20
2.3. Pengembangan Hipotesis.....	25
2.3.1. Ukuran .....	25
2.3.2. Tingkat Kekayaan .....	26
2.3.3. Tingkat Ketergantungan.....	28
2.4. Kerangka Pemikiran .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	31
3.1. Populasi dan Sampel Penelitian.....	31
3.2. Sumber Data .....	32
3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian .....	32
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	33
3.5. Alat Analisis .....	34
3.6. Pengujian Hipotesis .....	38
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	39
4.1. Analisis Deskriptif .....	39
4.2. Pemilihan Model Estimasi .....	42
4.2.1. Uji <i>Chow</i> .....	42



4.2.2. Uji <i>Hausman</i> .....	43
4.3. Pengujian Hipotesis .....	43
4.4. Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	45
4.5. Hasil Uji t.....	46
4.6. Hasil Uji F .....	46
4.7. Pembahasan .....	47
4.7.1. Pengaruh Ukuran Desa terhadap Efisiensi Keuangan Desa.....	47
4.7.2. Pengaruh Tingkat Kekayaan terhadap Efisiensi Keuangan Desa .	48
4.7.3. Pengaruh Tingkat Ketergantungan terhadap Efisiensi Keuangan Desa.....	48
 <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	 50
5.1. Simpulan .....	50
5.2. Keterbatasan Penelitian .....	52
5.3. Saran .....	52

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Kasus Penyelewengan Dana Desa Di Indonesia.....	5
Tabel 1.2 Kasus Penyelewengan Dana Desa Di Lampung.....	6
Tabel 1.3 Rincian Alokasi Dana Desa Tahun 2015 di Provinsi Lampung .....	8
Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah.....	18
Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	20
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	32
Tabel 3.2 Variabel Penelitian dan Sumber Data .....	33
Tabel 4.1 Mekanisme Pemilihan Data Berdasarkan Kriteria.....	39
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Variabel Kinerja Keuangan (Y).....	40
Tabel 4.3 Uji Chow .....	42
Tabel 4.4 Uji Hausman .....	43
Tabel 4.5 Hasil Uji dengan Model <i>Fixed Effect</i> .....	43
Tabel 4.6 Deskripsi Hasil Uji t.....	46

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	30

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Akuntansi sebagai dasar pengelolaan keuangan desa memberikan acuan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin. Wujud dari pertanggungjawaban pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa, dengan dikeluarkannya berbagai laporan keuangan desa. Hal ini diperkuat dengan disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, yang kemudian diikuti dengan peraturan-peraturan lainnya terkait pelaksanaan keuangan desa.

Sesuai dengan agenda pembangunan nasional yang dikenal dengan Nawacita yang tertuang dalam Perpres No. 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019, pada urutan ketiga disebutkan bahwa membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dalam kerangka NKRI. Jelas sekali bahwa pembangunan dimulai dari tingkat pemerintahan terkecil yakni desa. Untuk mewujudkan nawacita ketiga ini, pemerintah memicu pembangunan di desa dengan meningkatkan alokasi dana desa. Target capaiannya setiap desa mendapatkan dana desa sebesar 1 milyar, yang pembayarannya dilakukan secara bertahap dalam 1 tahun periode anggaran.

Tujuan dari penataan desa adalah mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintah Desa dan meningkatkan daya saing Desa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu mengenai pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) untuk menunjang segala sektor di masyarakat.

Alokasi Dana Desa bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten diluar Dana Alokasi Khusus (DAK). Bergulirnya dana-dana perimbangan tersebut melalui Alokasi Dana Desa dapat menjadikan desa benar-benar sejahtera. Alokasi Dana Desa dengan asas adil dan merata, tidak diskriminatif, transparan, mendorong kemajuan bagi desa penerima.

Pedoman daerah untuk menghitung besarnya Alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :

1. 247/PMK.07/2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa;
2. 257/PMK.07/2015 tentang tata cara penundaan dan/atau pemotongan dana perimbangan terhadap daerah yang tidak memenuhi ADD yang kemudian dijabarkan didalam Peraturan Bupati.

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang



dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan pemberian Alokasi Dana Desa adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan social masyarakat.
4. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Tahun 2015 merupakan tahun pertama kalinya Indonesia mengucurkan Dana Desa sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana ini diharapkan agar dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi Dana Desa ini diharapkan mampu mengangkat daerah yang sifatnya susah untuk berkembang sehingga mampu mengejar ketertinggalannya dari daerah lain, namun apakah dengan kondisi desa yang ada sekarang mampu mengelola Dana Desa ini dengan baik?

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dana desa T.A. 2015 oleh Kementerian Keuangan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI, penyebab lambat dan rendahnya realisasi penyaluran dana desa dari Kabupaten/kota ke desa pada T.A. 2015 yaitu:

1. Sebagian daerah belum memasukkan dana desa dalam APBD induk.
2. Sebagian daerah terlambat menetapkan Perbup/perwali tentang pengalokasian dana desa per desa.
3. Sebagian daerah harus mengubah penetapan alokasi dana desa per desa karena jumlah desanya berbeda dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.
4. Sebagian daerah terlambat menetapkan Perbup/Perwali tentang Pedoman pengelolaan keuangan desa dan tentang pengadaan barang/jasa di desa.
5. Sebagian daerah menambahkan persyaratan penyaluran dana desa dari RKUD ke rekening kas desa, berupa dokumen RPJMDes dan RKPDes yang semakin menyulitkan bagi desa untuk segera menerima dana desa.
6. Sebagian daerah memeriksa dokumen pertanggungjawaban dana desa sebagai syarat penyaluran tahapan.
7. Terdapat daerah belum berani menyalurkan dana desa ke desa dan sebagian desa belum berani menggunakan dana desa karena belum ada pendamping desa.
8. Kekhawatiran perangkat desa terjerat kasus hukum karena kesalahan administrasi.

Berikut ringkasan kasus penyelewengan dana desa yang berhasil dihimpun oleh LSM Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA):

**Tabel 1.1**  
**Kasus Penyelewengan Dana Desa di Indonesia**

No	Kabupaten	Modus	Kerugian	Status Hukum	Pelaku
1	Karo	Kesalahan adminitrasi dalam pertanggung jawaban penggunaan ADD di desa	Rp. 478 juta	Tersangka	Kepala desa Desa Cinta Rakyat Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo
2	Medan	Pengerjaan tidak selesai dilakukan dan terdapat selisih dana	Rp 31 juta	dihukum tiga tahun penjara.	Mantan kepala desa payah itik
3	Seram Bagian Timur	Dugaan korupsi penyalahgunaan dana desa pada tahun 2015	Dari total anggaran berkisar Rp. 250 – Rp. 300 juta per desa, sekitar 30% di salahgunakan.	Penetapan tersangka	Kepala Desa Kilimuri; SFG, Kepala Desa Undur; ARW, Kepala Desa Kian Darat; MSK, Kepala Desa Kilwaru; AM, Kepala Desa Miran Manaban; dan IGK, Kepala Desa Rurat
4	Tangerang	Penyelewengan dana desa	Rp. 383 juta	Pengecekan dan pengumpulan informasi	Kepala desa di Kecamatan Balaraja,
5	Bima	Menyelewengkan alokasi dana desa (ADD)	Rp. 500 juta per desa	Pengecekan dan pengumpulan informasi	9 desa yang dilaporkan berasal dari berbagai kecamatan di Bima, di antaranya Kecamatan Monta, Sape, dan Palibelo
6	Wonogiri	Penyalahgunaan dana desa	Rp. 416 Juta	Tersangka	Kepala Desa (Kades) Songbledek, Paranggupito,
7	Semarang	Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD)		Persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)	Kepala Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo (nonaktif), Samidin

Sumber : LSM FITRA

Kasus mengenai implementasi pengelolaan dana desa terus bergulir. Hal ini menjadi sorotan publik karena berdasarkan hasil investigasi dari lembaga FITRA, hampir diberbagai daerah di Indonesia terdapat kasus yang serupa. Tak terkecuali di Lampung. Berdasarkan data dari kejaksaan negeri gunung sugih dan lampung selatan yang dipublikasi [www.lampost.co](http://www.lampost.co) yaitu:

**Tabel 1.2**  
**Kasus Penyelewangan Dana Desa di Lampung**

No	Kabupaten	Modus	Kerugian	Status Hukum	Pelaku
1	Lampung Tengah	SPJ Fiktif	Rp. 100 juta	Tersangka	Widodo, Kepala Kampung Sendang Mulya
2	Lampung Selatan	SPJ Fiktif	Rp. 144 juta	Terlapor	Juheruddin, Kepala Desa Banding Kecamatan Rajabasa

Sumber : [www.lampost.co](http://www.lampost.co)

Publikasi media di [www.lampost.co](http://www.lampost.co) pada hari Selasa, 06 Desember 2016, Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Sugito, menyebutkan evaluasi penggunaan dana desa menunjukkan adanya penyelewangan oleh oknum-oknum kepala desa sebesar 10% dari total dana desa yang disalurkan. Setelah ditelusuri secara mendalam, kinerja kepala desa kurang transparan dan akuntabel terutama mengenai kondisi keuangan desa.

Kemudian berdasarkan laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2015, terdapat 14 potensi persoalan dalam pengelolaan dana desa yang dibagi dalam 4 aspek besar; regulasi dan kelembagaan, tata laksana, pengawasan dan sumber daya manusia. Dampak nyata dari UU No. 6 Tahun 2014 adalah

diberikannya fasilitas anggaran pembangunan pada 74.093 desa di seluruh tanah air. Undang-undang ini mengamanatkan pada pemerintah untuk mengalokasikan 10% APBN dan pada tahun 2017 menargetkan tiap desa mendapatkan dana desa minimal Rp. 1 milyar. APBN-P pada tahun 2015 menganggarkan dana desa sebesar Rp. 20,7 triliun dengan total yang disalurkan sampai akhir 2015 mencapai Rp. 19,8 triliun.

Mengingat banyaknya kasus korupsi di daerah, karakteristik desa yang variatif, kompetensi aparat juga regulasi yang masih baru, KPK menduga akan banyak celah korupsi pada saat penyaluran dana desa tersebut. Mulai dari proses perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi.

Dari data Indeks Kemajuan Desa (IKD) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dihimpun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung tahun 2016, Provinsi Lampung memiliki jumlah desa sebanyak 2435 desa. Dengan demikian ada banyak karakteristik dari masing-masing daerah yang berbeda. Dengan jumlah yang tidak sedikit ini, diperlukan pengelolaan dana desa dengan baik. Hal ini juga terkait dengan adanya peraturan dan sosialisasinya pada perangkat/aparatur desa, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari peraturan. Berikut rincian alokasi dana desa di Provinsi Lampung pada tahun 2015:



**Tabel 1.3**  
Rincian Alokasi Dana Desa Tahun 2015 di Provinsi Lampung

No	Nama Kabupaten/Kota	Alokasi (Dalam Rupiah)	Rank
1	Kab. Lampung Barat	36.292.903.000	9
2	Kab. Lampung Selatan	73.656.914.000	4
3	Kab. Lampung Tengah	84.410.047.000	1
4	Kab. Lampung Timur	76.156.736.000	3
5	Kab. Lampung Utara	65.563.245.000	5
6	Kab. Mesuji	29.397.590.000	12
7	Kab. Pesawaran	41.542.850.000	7
8	Kab. Pesisir Barat	32.175.347.000	11
9	Kab. Pringsewu	34.831.337.000	10
10	Kab. Tanggamus	81.744.367.000	2
11	Kab. Tulang Bawang	41.463.133.000	8
12	Kab. Tulang Bawang Barat	26.394.427.000	13
13	Kab. Way Kanan	61.098.757.000	6
	<b>Jumlah</b>	<b>684.727.653.000</b>	

Sumber: Arsip data Badan PMPD Provinsi Lampung

Dari tabel diatas terlihat bahwa Kabupaten Lampung Tengah memperoleh dana desa terbesar dan yang terkecil adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pemberitaan media massa online lampungpost.co pada tanggal 24 September 2016 menyebutkan implementasi UU Desa di Provinsi Lampung telah menimbulkan persoalan dugaan kasus hukum dana desa, seperti yang terjadi di wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan oleh Kepala Kampung Sendangmulya, Widodo, menjadi tamparan pada program desa membangun sebagaimana tertuang dalam UU Desa. Kakam Widodo diduga melakukan penyalahgunaan anggaran dana desa (ADD) tahun 2015. Kerugian negara ditaksir Rp100 juta dari total anggaran Rp400 juta. Modus yang dilakukan sang kakam diduga dengan membuat surat pertanggungjawaban fiktif, pengurangan volume pekerjaan fisik, dan pemberian insentif kepada karang taruna setempat. Kasus Kampung Sendangmulya merupakan fenomena gunung es dari penyimpangan

pengelolaan anggaran desa, kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi upaya optimalisasi program desa membangun. Sebuah manifestasi dari semangat UU Desa untuk memperkuat peran desa sebagai ujung tombak pembangunan.

Ditinjau dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh karakteristik desa terhadap efisiensi keuangan desa di Lampung. Karakteristik desa pada penelitian ini mengadopsi dari karakteristik pemerintah daerah dari berbagai penelitian sebelumnya. Hal ini dilakukan karena desa merupakan bagian terkecil dari pemerintahan dan belum ada penelitian sebelumnya tentang karakteristik desa.

Pada penelitian ini menggunakan variabel ukuran, tingkat kekayaan dan tingkat ketergantungan sebagai penjelas dari karakteristik desa. Ukuran-ukuran yang digunakan dari masing-masing variabel dapat dilihat pada bagian definisi operasional di Bab III.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Keberhasilan pengelolaan dana desa yang meningkatkan efisiensi keuangan desa dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya adalah karakteristik desa. Pada penelitian ini karakteristik desa di proksikan yang meliputi ukuran desa, tingkat kekayaan desa dan tingkat ketergantungan desa. Berdasarkan hal tersebut serta latar belakang, maka pertanyaan pada penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran desa berpengaruh terhadap efisiensi keuangan desa?
2. Apakah tingkat kekayaan desa berpengaruh terhadap efisiensi keuangan desa?

3. Apakah tingkat ketergantungan desa berpengaruh terhadap efisiensi keuangan desa?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fenomena dan adanya kesenjangan implementasi kebijakan tentang pengelolaan keuangan desa terkait dengan efisiensi keuangan desa, maka tujuan dari penelitian ini adalah menguji dan memberikan bukti empiris karakteristik desa manakah yang berpengaruh terhadap efisiensi keuangan desa di Lampung.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemecahan masalah dalam pengelolaan keuangan desa dan meningkatkan efisiensi keuangan desa di Lampung, sehingga dapat meminimalisir terjadinya ketidakpatuhan terhadap peraturan saat proses implementasi. Sehingga efisiensi keuangan desa makin meningkat dan sesuai dengan apa yang telah menjadi tujuan utama adanya program dana desa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Kontingensi Struktural (*Structure Contingency Theory*)**

Teori kontingensi struktural merupakan bagian dari teori organisasi. Teori ini merangkum bahwa tiap organisasi mengadaptasi struktur dengan menggeser keadaan yang tidak cocok (*misfit*) sebagai akibat adanya performansi rendah kepada keadaan cocok (*fit*), dimana ada keteraturan untuk mencapai efektifitas dan performansi organisasi, atau perubahan struktural sifat positif dan produktif terhadap organisasi (Thoha, 2008).

Kritik pada teori muncul dari Pfeffer dan Salancik (1978) melihat bahwa teori ketidakpastian struktural tidak memperhatikan aspek politik dalam pembentukan struktur. Penelitian mereka tentang pengendalian kekuasaan menyatakan struktur sebuah organisasi kapanpun merupakan hasil dari mereka yang mempunyai kekuasaan untuk memilih struktur yang sampai tingkat semaksimal mungkin mempertahankan dan memaksimalkan kontrol mereka. Perspektif pengendalian kekuasaan tidak mengabaikan dampak dari besaran (*size*), teknologi atau variabel ketidakpastian/kontingensi lainnya, justeru pengendalian kekuasaan

memperlakukan variabel kontingensi sebagai kendala yang dihadapi melalui proses yang disebut sebagai proses politis.

### **2.1.2 Efisiensi**

Mardiasmo (2009) mendefinisikan bahwa sistem pengukuran kinerja publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Adapun indikator kinerja seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2009) bahwa sekurang-kurangnya ada empat tolak ukur penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu:

1. Penyimpangan antara realisasi anggaran dengan yang ditargetkan yang ditetapkan dalam APBD.
2. Efisiensi biaya.
3. Efektivitas program.
4. Pemerataan dan keadilan.

Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan sumber dana yang serendah-rendahnya (Mahsun, 2016).

Menurut Jones dan Pendlebury (2000) efisiensi juga dapat dihitung dengan menggunakan rasio perbandingan antara *output* dan *input*. Hal ini dapat dikembangkan dengan empat cara yaitu:

1. Meningkatkan output dengan input yang sama.
2. Meningkatkan output dengan proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input.
3. Menurunkan input dengan output yang sama.
4. Menurunkan input dengan proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan output.

Berikut rumus rasio efisiensi menurut Menurut Jones dan Pendlebury (2000):

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}}$$

### 2.1.1 Karakteristik Desa

Sorokin dan Zimmerman mengemukakan sejumlah faktor yang menjadi dasar dalam menentukan desa dan kota. Ia membedakan desa dan kota berdasarkan atas: mata pencaharian, ukuran komunitas, tingkat kepadatan penduduk, lingkungan, diferensiasi sosial, stratifikasi sosial, interaksi sosial, dan solidaritas sosial (Adisasmita, 2006).

Interaksi sosial juga sebagai faktor penentu, secara umum dirumuskan bahwa jumlah kontak sosial pada masyarakat kota jauh lebih banyak dan bervariasi dibanding dengan masyarakat pedesaan. Jenis – jenis mata pencaharian

masyarakat kota yang sangat bervariasi memungkinkan terjadinya banyak kontak sosial diantara mereka.

Pendapat lain yang juga merumuskan karakteristik desa adalah Landis (2000) menurutnya desa adalah masyarakat yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan karakteristik berikut:

1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa.
2. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan.
3. Cara berusaha (perekonomian) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam seperti; iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan (LPDP, 2016).

#### **2.1.3.1. Ukuran**

Ukuran (*size*) dapat diukur dengan berbagai cara, antara lain jumlah karyawan, jumlah aktiva, total pendapatan, dan tingkat produksi (Damanpour, 1991).

Kusumawardani (2012) menyatakan ukuran yang besar dalam pemerintah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai. Pemerintah daerah dengan ukuran yang lebih besar akan memiliki tekanan yang besar juga untuk melakukan pengungkapan kinerja. Demikian pula di level pemerintah desa. Pemerintah desa dalam melakukan pengungkapan atas laporan kinerjanya akan lebih terdorong untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat berita baik guna meningkatkan kinerjanya.

Watt and Zimmerman (1986) menyatakan bahwa makin besar biaya politik yang harus ditanggung oleh perusahaan, manajer cenderung lebih memilih prosedur akuntansi yang menyerah pada laba yang dilaporkan dari masa sekarang menuju masa depan. Hipotesis biaya politik memperkenalkan suatu dimensi politik pada pemilihan kebijakan akuntansi. Perusahaan-perusahaan yang ukurannya sangat besar mungkin dikenakan standar kinerja yang lebih tinggi dengan penghargaan terhadap tanggung jawab lingkungan. Jika dikaitkan dengan ukuran desa sebagai pemerintahan terkecil, maka desa dengan total pendapatan yang besar cenderung mendapatkan perhatian publik lebih besar pula, sehingga cenderung berusaha lebih baik dalam melakukan pelaporan atas transaksi keuangan dibandingkan dengan desa yang memiliki total pendapatan lebih kecil.

#### **2.1.3.2. Tingkat Kekayaan**

Kekayaan diartikan sebagai sumber daya berupa harta. Definisi harta dalam perspektif akuntansi adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dalam berbagai bentuk baik wujud dan tak berwujud dan terdiri atas beberapa jenis (akun-akun) tertentu. Harta merupakan kekayaan dalam semua bentuk termasuk piutang, sewa di bayar dimuka, investasi pada usaha orang lain (Warren, 2014).

Aktiva atau yang biasa juga disebut Aset merupakan kekayaan (sumber daya) yang dimiliki oleh entitas bisnis yang bisa diukur secara jelas menggunakan satuan uang serta sistem pengurutannya berdasar pada seberapa cepat perubahannya dikonversi menjadi satuan uang kas. Aktiva dalam akuntansi



umumnya dikelompokkan ke dalam tiga bagian; aset lancar, aset tetap dan aset tak berwujud (Warren, 2014).

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar Pemda dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD. Karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya (Juliawati *et al.*, 2012).

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.

- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat daripihak ketiga.
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

### **2.1.3.3. Tingkat Ketergantungan**

Sesuai UU No. 6 Tahun 2014, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Menurut PMK No. 49 Tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa menyatakan bahwa alokasi dasar adalah alokasi minimal dana desa yang kan diterima oleh setiap desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% dari anggaran dana desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional.

Alokasi formula adalah alokasi dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis setiap kabupaten/kota. Hal ini berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang

tercantum dalam Permen Desa, Pembangunan Daeran Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016 yang membagi menjadi 5 kelompok yaitu Desa sangat tertinggal, Desa tertinggal, desa berkembang, Desa maju dan Desa mandiri.

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah propinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2010) :

$$\frac{\text{Pendapatan transfer}}{\text{Total pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah**

Prosentase	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM

#### 2.1.4 Keuangan Desa

UU No. 6 tahun 2014 tentang keuangan desa mendefinisikan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Sedangkan pengelolaan keuangan desa didefinisikan sebagai

seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Semua uang yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa adalah uang Negara dan uang rakyat, yang harus dikelola berdasar pada hukum atau peraturan yang berlaku, khususnya:

1. UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
4. Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan lain yang terkait pengelolaan keuangan desa:

1. UU Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Desa.
3. Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

## 2.2 Review Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.2**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No.	Judul Paper	Nama Penulis	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	The Effect of Local Government Characteristics and The Examination Result of Indonesian Supreme Audit Institutio on Economic Growth, with Financial Performance as Intervening Variable in District and City Government of Lmapung Province	Rindu Rika Gamayuni	Kuantitatif dengan regresi berganda	<p><i>Variabel Depennden</i> : Ukuran pemerintah daerah, Belanja daerah, Temuan audit, Opini audit</p> <p><i>Variable Independen</i> : Pertumbuhan ekonomi</p> <p><i>Variable Intervening</i>: Kinerja keuangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinerja keuangan pemerintah daerah (rasio efektivitas) dipengaruhi secara signifikan oleh ukuran pemda &amp; belanja daerah, namun tidak terpengaruh oleh temuan &amp; opini audit.</li> <li>- Kinerja keuangan pemerintah daerah (rasio efisiensi) tidak terpengaruh oleh ukuran pemda, belanja daerah, temuan &amp; opini audit.</li> <li>- Kinerja keuangan pemerintah daerah (rasio otonomi) dipengaruhi secara signifikan oleh belanja daerah &amp; opini audit, namun tidak terpengaruh oleh ukuran pemda &amp; temuan audit.</li> <li>- Kinerja keuangan pemerintah daerah (rasio efektivitas) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonmi. Hal ini dikarenakan pemda di Propinsi Lampung belum cukup efisien (biaya yg dikeluarkan belum sesuai dengan alokasi &amp; perenanaan) dan masih kurang otonom (pembiayaan masih tergantung dengan pusat).</li> </ul>
2.	Pengaruh Karakteristik Pmerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Pulau Jawa	Nandhya Marfiana, Lulus Kurniasih	Kuantitatif dengan regresi linear berganda	<p><i>Variabel Depennden</i> : Total asset, PAD, DAU, Realisasi belanja daerah, Ukuran legislative, Temuan audit, Opini Audit.</p> <p><i>Variable Independen</i> : Kinerja</p>	Ukuran pemda; tingkat kekayaan daerah; dan opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa. Sedangkan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan jumlah belanja daerah berpengaruh positif signifikan

				keuangan Kab./kota	terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, serta ukuran legislatif dan temuan audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa.
3.	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007	Widya Astuti Mustikarini, Debby Fitriyasi	Kuantitatif dengan regresi linear berganda	<p><i>Variabel Dependen</i> : Ukuran pemda, Tingkat kekayaan pemda, Tingkat ketergantungan pemda, Belanja daerah, Temuan audit</p> <p><i>Variable Independen</i> : Kinerja keuangan Kab./kota</p>	Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa semua variabel karakteristik Pemda dan juga temuan audit BPK berpengaruh signifikan terhadap variabel independen dengan arah yang sesuai dengan hipotesis kecuali untuk variabel belanja daerah. Variabel ukuran daerah, kekayaan daerah dan tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap skor kinerja Pemda sedangkan variabel belanja daerah dan temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap skor kinerja Pemda.
4.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah	Sri Rustyaningsih, Intan Immanuela	Kuantitatif dengan regresi linear berganda	<p><i>Variabel Dependen</i> : Ukuran pemda, PAD, Dana perimbangan (DAU), Leverage, Belanja daerah, Jumlah penduduk, Hasil audit BPK</p> <p><i>Variable Independen</i> : Kinerja pemerintah daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Secara bersama-sama variabel ukuran /size pemda, PAD, belanja daerah, pinjaman, DAU, jumlah penduduk, dan hasil audit BPK berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah karena nilai signifikansinya di bawah 0,05.</li> <li>- Secara parsial PAD dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah</li> <li>- Ukuran/size, DAU, belanja daerah, pinjaman, dan hasil audit BPK tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah</li> </ul>
5.	Analisis Pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	Cherrya Dhia Wenny	Kuantitatif dengan regresi linear berganda	<p><i>Variabel Dependen</i> : Pajak daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, Pendapatan lain2 yang sah.</p> <p><i>Variable Independen</i> : Kinerja</p>	Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi

				keuangan	Sumatera Selatan, artinya keseluruhan dari komponen PAD sangat mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. Penelitian juga dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.
6.	Pengaruh Belanja Modal, <i>Intergovernmental Revenue</i> , <i>Leverage</i> , <i>Size</i> dan PAD Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota di Pulau Jawa Tahun 2014	Rokhim Novyandra	Kuantitatif dengan regresi linear berganda	<i>Variabel Dependen</i> : Belanja modal, <i>intergovernmental revenue</i> , <i>leverage</i> , <i>size</i> , PAD  <i>Variable Independen</i> : Kinerja keuangan pemda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal dan <i>ntergovernmental revenue</i> berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kab/kota di Pulau Jawa. Sedangkan <i>size</i> , <i>leverage</i> dan PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kab/kota di Pulau Jawa.
7.	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kab/Kota di Jawa Timur)	Asmaul Aziz	Kuantitatif dengan regresi linear berganda	<i>Variabel Dependen</i> : <i>Size</i> , <i>intergovernmental revenue</i> , Belanja modal  <i>Variable Independen</i> : Kinerja keuangan pemda	Ukuran ( <i>size</i> ), <i>intergovernmental revenue</i> dan belanja daerah terbukti berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kab/Kota di Jawa Timur
8.	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemrintah Daerah	Hendro Sumarjo	Kuantitatif dengan regresi linear berganda	<i>Variabel Dependen</i> : <i>Size</i> Pemda, Kemakmuran Pemda, Ukuran legislative, <i>Leverage</i> , <i>intergovernmental revenue</i> , Belanja modal  <i>Variable Independen</i> : Kinerja keuangan pemda	Hasil penelitian menunjukkan variable <i>size</i> , <i>leverage</i> dan <i>intergovernmental revenue</i> berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Variable kemakmuran dan ukuran legislative tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.
9.	Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2002 – 2006	A.A.N.B.Dwirandra	Kuantitatif dengan analisis rasio dan analisis tren	<i>Variabel Dependen</i> : Efektivitas dan Kemandirian Keuangan  <i>Variable Independen</i> :	Hasil penelitian ini adalah Daerah otonom dalam periode tersebut masuk dalam kategori keuangan yang efektif dengan rasio efektivitas keuangan (EKD) berkisar dari 75,01 % sampai

				Keuangan Daerah Otonom	dengan di atas 100%.  Kemandirian keuangan yang sedang (rasio KKD lebih dari 50% sampai dengan 75%) dan rendah (rasio KKD lebih dari 25% sampai dengan 50%) masing-masing hanya satu kabupaten/kota,  Pada tahun 2006, dibandingkan dengan tahun 2002, <i>trend</i> efektivitas keuangan semakin baik.
10.	Government Expenditures Effect on Economic Growth <i>The Case Sweden 1960-2001</i>	Peter Sjoberg	Kuantitatif dengan regresi	<i>Variabel Dependen</i> : Efek belanja pemerintah  <i>Variable Independen</i> : Pertumbuhan ekonomi	Hasil dari penelitian ini adalah menyarankan agar pemerintah Swedia tidak membelanjakan secara berlebihan dan sesuai fungsinya, karena hal ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.
11.	Chacteristic Local Government and Governmnet Performance : An Emperical Examination of The Local Government in Indonesia	Kunti Sunaryo, Abdul Ghofar	Kuantitatif dengan regresi	<i>Variabel Dependen</i> : size, PAD, total aset, DAU, Belanja modal  <i>Variable Independen</i> : Kinerja pemerintah	Hasil penelitian ini adalah variable size dan PAD berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan variabel total aset, DAU dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
12.	Fiscal Desentralization and Economic Growth Reconsidered	John Thornton	Kuantitatif dengan regresi	<i>Variabel Dependen</i> : Pajak, Investasi, populasi usia kerja  <i>Variable Independen</i> : Pertumbuhan ekonomi  <i>Variabel Dummy</i> : Struktur pemerintah	Hasil empiris dari penelitian ini adalah ketika ukuran desentralisasi terbatas pada pendapatan daerah dengan otonomi penuh, dampaknya pertumbuhan ekonomi di negara2 OECD secara statistic tidak signifikan.
13.	Fiscal Decentralization and Economic Growth in China	Justin Yifu Lin, Zhiqiang Liu	Kuantitatif dengan regresi	<i>Variabel Dependen</i> : Desentralisasi fiskal, system pertanggungjawban, produk pertanian & yang bukan, kapasitas keuangan, PDB, jumlah penduduk, total penduduk urban	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Cina. Hasil ini menggambarkan dua kesimpulan: - System pertanggungjawaban di sector daerah dan privatisasi sector industry telah menngkatkan pertumbuhan ekonomi di Cina.



				<i>Variable Independen</i> : Pertumbuhan ekonomi	- Berdasarkan data, desentralisasi fiskal telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Cina, terutama pada efisiensi alokasi sumberdaya dibandingkan investasi
14.	Public Spending and Outcomes : Does Governance Matter?	Andrew Sunil Rajkumar, Vinaya Swaroop	Regresi OLS	<i>Variabel Dependen</i> : Tingkat kematian dibawah usia 5 tahun.  <i>Variable Independen</i> : Pengeluaran kesehatan publik, tingkat korupsi pemerintahan	Hasil riset menemukan bahwa pengeluaran kesehatan masyarakat memiliki dampak negatif yang kuat pada kematian anak di negara dengan pemerintahan yang baik. Tingkat korupsi turun sejalan dengan meningkatnya kualitas pemerintah. Dengan meningkatnya kualitas pemerintah berdampak pada kualitas pelayanan pada masyarakat yang semakin membaik. Juga berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Belanja publik untuk kesehatan menjadi lebih efektif menurunkan angka kematian anak.
15.	The Relationship Between Budgetary Evaluation, Firm Size and Performance	Azzouz Elhamma	Regresi	<i>Variabel Dependen</i> : Kinerja perusahaan  <i>Variable Independen</i> : Evaluasi anggaran, ukuran perusahaan	Hasil penelitian menemukan bahwa evaluasi anggaran dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Pada penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan dengan proksi modal dan jumlah karyawan.
16.	Government Size Composition, Volatility and Economic Growth	Antonio Afonso, Davide Furcerri	Regresi	<i>Variabel Dependen</i> : Pertumbuhan ekonomi  <i>Variable Independen</i> : Ukuran pemerintah	Ukuran pemerintah merupakan variabel determinan dari pertumbuhan ekonomi di negara anggota OECD dan EU. Dengan demikian juga mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah, dimana peningkatan pertumbuhan ekonomi terkait dengan peningkatan pendapatan. Semakin besar ukuran pemerintah maka semakin besar pula biaya politik yang dikeluarkan. Hal ini terkait dengan teori <i>political cost</i> .

Sumber : Data diolah

## 2.3 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara yang telah dirumuskan dan akan diuji kebenarannya (Sekaran, 2011).

### 2.3.1. Ukuran

Salah satu hipotesis dari *Positive Accounting Theory, Political Cost*, semakin besar biaya politik yang dihadapi perusahaan maka memungkinkan manajerial untuk mengambil kebijakan tertentu terkait dengan penyajian informasi keuangan. Semakin besar perusahaan maka semakin besar pula biaya politik yang dikeluarkan. Pengeluaran ini akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Pada sektor publik ukuran perusahaan disetarakan dengan ukuran pemerintah. Semakin besar ukuran pemerintah maka akan semakin tinggi biaya pengawasan terhadap lembaga tersebut (Riahi dan Belkaoui, 2006).

Chenhall (sebagaimana dikutip dalam Elhamma, 2015) organisasi yang tumbuh besar akan meningkatkan pengawasannya secara bertahap guna memperoleh informasi yang komprehensif. Dan berpendapat bahwa semakin besar ukuran organisasi, semakin besar pula penekanan terhadap anggaran dan pengawasan.

Salah satu fungsi anggaran pada sektor publik sebagai alat penilaian kinerja.

Kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa

hasil yang dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dan berhubungan dengan tingkat efektivitas dan efisiensinya (Mardiasmo, 2009).

Patrick (2007) menyatakan ukuran pemerintah daerah merupakan prediktor yang signifikan untuk kepatuhan akuntansi. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Afonso *et al.* (2008) menyatakan bahwa ukuran pemerintah merupakan variabel determinan dari pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi kinerja keuangan dinegara OECD dan European Union. Hasil penelitian Elhamma (2015) menguatkan penelitian sebelumnya bahwa ukuran perusahaan berkorelasi positif terhadap kinerja keuangan terkait dengan efektivitas dan efisiensinya.

Di Indonesia juga dilakukan penelitian yang mengukur kinerja keuangan dilihat dari ukuran pemerintah daerah. Penelitian Mustikarini (2007) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan. Penelitian Aziz (2016) menyatakan bahwa ukuran daerah berpengaruh positif signifikan terhadap efisiensi kinerja keuangan pemda Kab/Kota di Jawa Timur. Dari beberapa hasil penelitian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis pertama:

**H1 : Ukuran pemerintah daerah (Desa) berpengaruh positif terhadap efisiensi keuangan desa.**

### **2.3.2. Tingkat Kekayaan**

Abdullah (sebagaimana dikutip dalam Novyandra, 2016) kemakmuran (*wealth*) berhubungan dengan kekayaan dari pemerintah daerah dapat dilihat dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Saragih (2003) menjelaskan bahwa peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang positif mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong akan adanya perbaikan infrastruktur daerah. Infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi di suatu daerah akan meningkatkan PAD pemerintah daerah tersebut. Peningkatan PAD hendaknya didukung dengan peningkatan kualitas layanan publik. Adi (sebagaimana dikutip dalam Wenny, 2012) meningkatnya jumlah PAD dan kualitas layanan mencerminkan kinerja keuangan dan kinerja manajerial yang baik. Laporan evaluasi kinerja pemerintah di China mengindikasikan bahwa faktor penting lainnya selain PDB sebagai indikator pendapatan adalah tingkat pembangunan, tingkat pertumbuhan, etos kerja, dan faktor lainnya (Lin *et al.*, 2010).

Florida (sebagaimana dikutip dalam Rustiyaningsih, 2014) jumlah dan kenaikan pendapatan daerah sangat berperan dalam meningkatkan kemandirian pemerintah daerah yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dan Lin *et al.* (2010) menyatakan hasil penelitiannya bahwa pendapatan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap efisiensi dan efektivitas kinerja di Cina.

Penelitian Mustikarini (2007) menyatakan bahwa tingkat kekayaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Penelitian Wenny (2012) menyatakan bahwa PAD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Begitu pula dengan hasil penelitian Rustiyaningsih (2014) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemda.

Diperkuat dengan hasil penelitian Sunaryo (2015) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan.

Peningkatan pendapatan daerah akan menambah kekayaan daerah sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Kualitas layanan publik yang baik mencerminkan kinerja yang baik. Dengan demikian didapat hipotesis kedua:

**H2 : Tingkat kekayaan berpengaruh positif terhadap efisiensi keuangan desa.**

### **2.3.3. Tingkat Ketergantungan**

Tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat di Indonesia tercermin dari besarnya dana perimbangan yang diberikan. Definisi dana perimbangan menurut Undang- Undang Nomor 33 tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas: (1) Dana Alokasi Umum; (2) Dana Alokasi Khusus; dan (3) Dana Bagi Hasil. Dana desa termasuk dalam kategori Dana Alokasi Khusus.

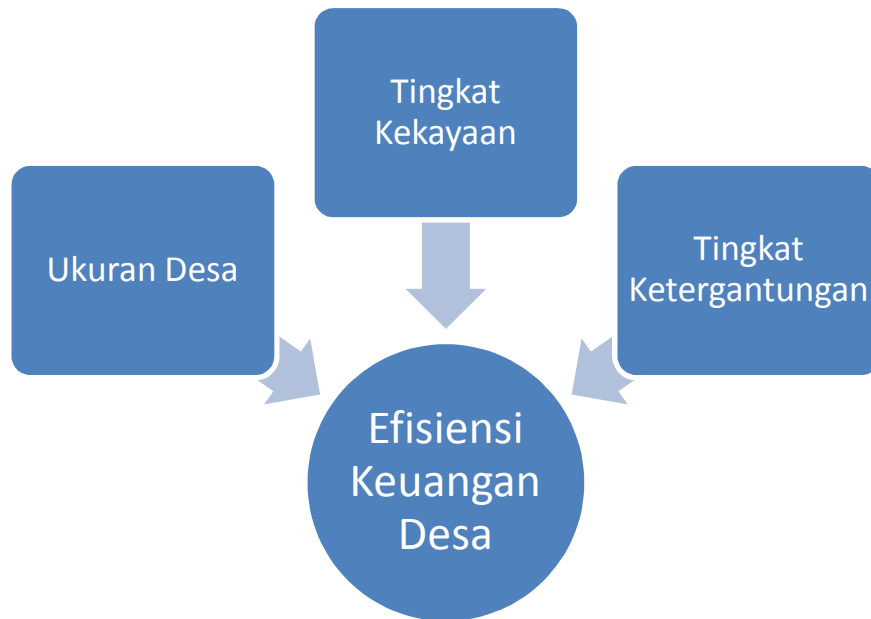
Patrick (2007) mengartikan *intergovernmental revenue* (dana perimbangan) sebagai salah satu pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai operasi pemerintah daerah. Sebagai timbal baliknya, pemerintah daerah membelanjakan pendapatan

transfer antar pemerintah sesuai dengan alokasi dan petunjuk anggaran dan menurut undang-undang. Pemerintah pusat berharap dengan adanya transfer tersebut maka pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerjanya. Patrick (2007) menggunakan *intergovernmental revenue* sebagai salah satu variabel dalam menjelaskan karakteristik pemerintah daerah Pennsylvania.

Mustikarini (2007) yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat berpengaruh positif signifikan. Hasil penelitian Marfiana (2011) dan Rustiyaningsih (2014) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, hal ini terkait dengan ketergantungan pendanaan di daerah terhadap pemerintah pusat. Dengan demikian didapat hipotesis ketiga:

**H3 : Tingkat ketergantungan berpengaruh positif terhadap efisiensi keuangan desa.**

## 2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka pemikiran

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Populasi dan Sampel Penelitian**

Sebelum melakukan sebuah penelitian haruslah terlebih dahulu menentukan populasi dan sampel sebagai subjek penelitian. Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi. Dan sampel adalah sebagian dari populasi (Sekaran, 2011).

Populasi pada penelitian ini adalah Desa di Lampung yang berjumlah 2435 desa. Sampel dikelompokkan berdasarkan Indeks Kemajuan Desa (IKD) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dihimpun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung dengan data sebagai berikut:

1. Desa Maju : 271 Desa
2. Desa Berkembang : 978 Desa
3. Desa Kurang Berkembang : 809 Desa
4. Desa Tertinggal : 377 Desa



### 3.2. Sumber Data

Menurut Sekaran (2011) data dapat diperoleh dari sumber primer atau sekunder. Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi dan data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada.

Pada penelitian ini data sekunder didapat dari dokumen profil desa yang diambil dari website [www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id](http://www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id) dan dokumen arsip Dinas Pemberdaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.

### 3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian diukur dengan karakteristik desa yang mempengaruhi efisiensi keuangan desa dan dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Definisi Operasional Variabel**

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Dimensi	Indikator
Karakteristik Desa: - Ukuran (X1)	Suatu nominal yg dapat mendeskripsikan sesuatu.	Besarnya ukuran organisasi diukur dengan total pendapatan (Damanpour, 1991)	Jumlah keseluruhan pendapatan desa .
- Tingkat Kekayaan (X2)	Terkait dengan PAD sebagai sumber keuangan daerah.	Terukurnya kekayaan daerah Diukur dengan rumus: <b>TK : PAD/Total Pendapatan</b> TK : Tingkat Kekayaan (Mustikarini,	Jumlah Pendapatan Asli Desa

- Tingkat Ketergantungan (X3)	Terkait dengan alokasi dana dari pemerintah pusat, dalam hal ini dana desa.	2012) Terukurnya distribusi dana desa. Diukur dengan rumus: <b>Pendapatan Transfer/Total Pendapatan x 100%</b> (Mahmudi, 2010)	Jumlah dana desa yang diterima.
Efisiensi Keuangan Desa (Y)	Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.	Terukurnya kinerja keuangan desa. Diukur dengan rumus :  <b>Efisiensi = Output/Input</b> (Jones dan Plendbury, 2000)	- Efisiensi program.

Sumber : Data diolah

### 3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan analisis dokumen. Berikut uraian sumber data dari masing-masing variabel penelitian:

**Tabel 3.2**  
**Variabel Penelitian dan Sumber Data**

Variabel Penelitian	Sumber Data
Efisiensi Keuangan Desa (Y)	Dokumen Profil Desa
Ukuran Desa (X1)	Dokumen Profil Desa
Tingkat Kekayaan (X2)	Dokumen Profil Desa
Tingkat Ketergantungan (X3)	Dokumen Dana Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa Provinsi Lampung

Sumber : Data diolah

### 3.5. Alat Analisis

Teknis analisis penelitian ini adalah analisis data panel. Data panel merupakan penggabungan dari data *time series* dan *cross section*. Data *time series* berupa data dana desa yang dimulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dan data *cross-section* yaitu 2435 desa yang telah melalui kriteria penyampelan data.

Pengolahan data penelitian ini akan menggunakan alat uji statistik *eviews9*, hasilnya kemudian dilakukan analisis sehingga diperoleh temuan-temuan dan saran-saran yang diberikan oleh penulis.

Wooldridge (sebagaimana dikutip dalam Ariefianto, 2012) data dengan karakteristik panel adalah data yang berstruktururut waktu sekaligus *cross section*. Data semacam ini memiliki keunggulan terutama karena bersifat *robust* terhadap beberapa tipe pelanggaran asumsi Gauss Markov, yaitu heterokedastisitas dan normalitas. Disamping itu dengan perlakuan tertentu struktur data seperti ini dapat diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih banyak.

#### **Analisis Regresi Data Panel**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel seperti telah diungkapkan sebelumnya. Data tersebut diregresikan menggunakan tiga Model regresi diantaranya adalah *common effect model* yaitu model kuadrat terkecil, *fixed effect model* merupakan model dengan pendekatan efek tetap, dan *random effect model* yaitu pendekatan dengan efek acak. Dari ketiga model tersebut untuk

mendapatkan model yang terbaik untuk penelitian ini, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap masing-masing model (Widarjono, 2009).

Pengujian untuk memilih model *common effect* dan *fixed effect* dapat melakukan uji *chow*, apabila hasil dari pengujian terpilih model *fixed effect* maka langkah selanjutnya adalah menguji model *fixed effect* dengan *random effect* menggunakan uji *Hausman specification test* (Widarjono, 2009).

### ***Common Effect Model***

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel (Widarjono, 2009).

### ***Fixed Effect Model***

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel model *Fixed Effects* menggunakan teknik *variable dummy* untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan, perbedaan intersep bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif. Namun demikian sloponya sama antar perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variable* (LSDV) (Widarjono, 2009).

### ***Random Effect Model***

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model *Random Effect* perbedaan intersep diakomodasi oleh *error terms* masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model *Random Effect* yakni menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan *Error Component Model* (ECM) atau teknik *Generalized Least Square* (GLS) (Widarjono, 2009).

### **Menentukan Model Terbaik**

Widarjono (2009) menjelaskan untuk memilih model yang paling tepat digunakan dalam mengelola data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan yakni:

#### 1. Uji Chow

Chow test yakni pengujian untuk menentukan model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam uji chow adalah:

H0: *Common Effect Model* atau pooled OLS

H1: *Fixed Effect Model*

Dasar penolakan terhadap hipotesis diatas adalah dengan membandingkan perhitungan F-statistik dengan F-tabel. Perbandingan dipakai apabila hasil F hitung lebih besar ( $>$ ) dari F tabel maka H0 ditolak yang berarti model yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Begitupun sebaliknya, jika F hitung lebih kecil ( $<$ ) dari F tabel maka H0 diterima dan model yang digunakan adalah *Common Effect Model*.

## 2. Uji Hausman

Hausman test adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan. Pengujian uji Hausman dilakukan dengan hipotesis berikut:

H0 : *Random Effect Model*

H1 : *Fixed Effect Model*

Statistik Uji Hausman ini mengikuti distribusi *statistic Chi Square* dengan *degree of freedom* sebanyak  $k$ , dimana  $k$  adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka H0 ditolak dan model yang tepat adalah model *Fixed Effect* sedangkan sebaliknya bila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model *Random Effect*.

## 3. Uji Lagrange Multiplier

Untuk mengetahui apakah model *Random Effect* lebih baik daripada metode *Common Effect* (OLS) digunakan uji Lagrange Multiplier (LM). Pengujian uji Hausman dilakukan dengan hipotesis berikut:

H0 : *Common Effect Model*

H1 : *Random Effect Model*

Uji LM ini didasarkan pada distribusi *chi-squares* dengan *degree of freedom* sebesar jumlah variabel independen. Jika nilai LM statistik lebih besar dari nilai kritis statistik *chi-squares* maka kita menolak hipotesis nul, yang artinya estimasi yang tepat untuk model regresi data panel adalah metode *Random Effect* dari pada metode *Common Effect*. Sebaliknya jika nilai LM statistik lebih kecil dari nilai statistik *chi-squares* sebagai nilai kritis, maka kita

menerima hipotesis nul, yang artinya estimasi yang digunakan dalam regresi data panel adalah metode *Common Effect* bukan metode *Random Effect*.

### 3.6. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan analisis regresi linear berganda menggunakan Eviews9. Regresi linear berganda digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan  $\alpha = 5\%$  maka persamaan regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = a + a_1X1_{it} + a_2X2_{it} + a_3X3_{it} + \epsilon_{it}$$

Y = Efisiensi keuangan desa

a = Konstanta

X1 = Ukuran

X2 = Tingkat kekayaan

X3 = Tingkat ketergantungan

i = Desa

t = 2015, 2016

$\epsilon_{it}$  = *residual error*

a1-a2 = Koefisien parameter

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ukuran desa berpengaruh negatif signifikan terhadap efisiensi keuangan desa di Provinsi Lampung. Hipotesis ini tidak terdukung karena semakin besar ukuran desa maka semakin rendah rasio efisiensi keuangan yang berarti semakin tidak efisien. Total pendapatan yang menjadi proksi ukuran desa, merupakan salah satu komponen penting dalam laporan keuangan yang menjadi tolak ukur pengukuran kinerja keuangan. Pemerintah daerah dengan ukuran yang lebih besar akan memiliki tekanan yang besar juga untuk melakukan pengungkapan kinerja. Demikian pula di level pemerintah desa. Pemerintah desa dalam melakukan pengungkapan atas laporan kinerjanya akan lebih terdorong untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat berita baik guna meningkatkan kinerjanya.
2. Tingkat kekayaan berpengaruh positif terhadap efisiensi keuangan desa di Provinsi Lampung. Semakin besar tingkat kekayaan maka semakin besar pula rasio efisiensi keuangannya. Tingkat kekayaan merupakan salah satu barometer kemajuan dari suatu daerah yang dilihat dari banyaknya sumber



daya yang dimiliki. Peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang positif mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong akan adanya perbaikan infrastruktur daerah. Infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi di suatu daerah akan meningkatkan PAD pemerintah daerah tersebut. Peningkatan PAD hendaknya didukung dengan peningkatan kualitas layanan publik. Meningkatnya jumlah PAD dan kualitas layanan mencerminkan kinerja keuangan dan kinerja manajerial yang baik. Jumlah dan kenaikan pendapatan daerah sangat berperan dalam meningkatkan kemandirian pemerintah daerah yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Peningkatan pendapatan daerah akan menambah kekayaan daerah sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Kualitas layanan publik yang baik mencerminkan kinerja yang baik.

3. Tingkat ketergantungan berpengaruh positif signifikan terhadap efisiensi keuangan desa di Provinsi Lampung. Semakin tinggi tingkat ketergantungan maka semakin tinggi rasio efisiensi keuangan desa, artinya semakin efisien. *Intergovernmental revenue* (dana perimbangan) sebagai salah satu pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai operasi pemerintah daerah. Sebagai timbal baliknya, pemerintah daerah membelanjakan pendapatan transfer antar pemerintah sesuai dengan alokasi dan petunjuk anggaran dan menurut undang-undang. Pemerintah pusat berharap dengan adanya transfer tersebut maka pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerjanya.

## 5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, diantaranya yaitu:

1. Pengukuran kinerja keuangan masih dilihat hanya dari sisi efisiensi dikarenakan ketersediaan data dilapangan yang terbatas.
2. Dari jumlah populasi yang ada, hanya didapat 108 sampel desa maju dan 272 sampel desa berkembang. Hal ini dikarenakan ketersediaan data dilapangan yang terbatas.
3. Sampel yang digunakan berdasarkan empat kriteria Indeks Kemajuan Desa (IKD), hanya 2 kriteria yang digunakan. Hal ini juga terkait dengan ketersediaan data yang terbatas.
4. Jumlah sampel yang menggunakan aplikasi siskeudes masih minim.

## 5.3. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diungkapkan pada bagian sebelumnya, maka disarankan untuk penelitian selanjutnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja keuangan dilihat dari sisi efisiensi juga efektivitasnya agar lebih akurat hasil pengukuran kinerjanya.
2. Sebaiknya menambahkan variabel lainnya, misalnya sumber daya manusia agar lebih komprehensif hasil penelitiannya.
3. Guna menekan perilaku oportunistik penyelenggara dan pelaksana dana desa, Pemerintah Daerah dan Pusat diharapkan dapat melaksanakan *e-planning*, *e-budgeting* dan *e-monitoring* dalam penyusunan dan penyaluran dana desa. Dengan *e-planning* diharapkan aspirasi masyarakat akan kebutuhan

pembangunan dapat diakomodir dengan baik, dan dengan *e-budgeting dan e-monitoring* yang menganut prinsip akuntabel dan transparansi, diharapkan semua *stakeolder* dapat berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan dana desa. Dengan demikian diharapkan pada tataran implementasinya dapat mencegah upaya penyelewengan dari dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Afonso, Antonio. Davide Furcerri. 2008. *Government Size Composition, Volatility and Economic Growth*. Working Paper Series European Central Bank
- Ariefianto, Moch. Doddy. 2012. *Ekonometrika, Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan Eviews*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Aziz, Asmaul. 2016. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur)*
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Pusat Pengembangan Akuntansi* Fakultas Ekonomi. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Damanpour, F. 1991. *Organizational Innovation: A Meta-Analysis of Effects of Determinants and Moderators*. Academy of Management Journal
- Elhamma, Azzouz. 2015. *The Relationship Between Budgetary Evaluation, Firm Size and Performance*. Emerald Insight, Journal of Management and Development
- Gamayuni, Rindu Rika. 2016. *The Effect of Local Government Characteristics and The Examination Result of Indonesian Supreme Audit Institution on Economic Growth, with Financial Performance as Intervening Variable in District and City Government of Lampung Province*. IISTE Research Journal of Finance and Accounting
- Halim, Abdul, 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 3 Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta.
- Jones, Rowan. Maurice Pendlebury. 2000. *Public Sector Accounting, Fifth Edition*. Prentice Hall,
- Juliawati, Ebit. Darwanis dan Jalaluddin. 2012. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh*. Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala

- Kusumawardani, Media. 2012. Pengaruh *Size*, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*.
- Lin, Ming-Lan, Yuan-Duan Lee, Tsai-Neng Ho. 2010. *Applying Integrated DEA/AHP to Evaluate The economic Performance of Local Governments in China*. *European Journal of Operational Research*
- Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). 2016. *Program & Proyek Strategis Pembangunan Desa*. Mata Garuda Institute. Jakarta
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Ketiga*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN. Yogyakarta
- Mahsun, Muhammad. 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Marfiana, Nandhya. Lulus Kurniasih. 2011. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Pulau Jawa*.
- Mustikarini, Widya Astuti dan Fitriasari, Debby. 2012. *Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007*. Simposium Nasional Akuntansi Indonesia 15.
- Nasser, Abdul Hasibuan. 2009. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Ekonomi Makro Terhadap Return Saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia*.
- Njoku, C.O, K.E. Ugwu, E.E. Chigbu. 2014. *Governments Public Expenditures: Effect on Economic Growth (The Case of Nigeria, 1961-2013)*. *International Journal of Research in Management, Science & Technology*
- Novyandra, Rokhim. 2016. *Pengaruh Belanja Modal, Intergovernmental Revenue, Leverage, Size dan PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2014*
- Patrick, Patrisia A. 2007. *The Determinants of The Organizational Innovativeness : The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government*.
- Patrick, Patrisia A., John M. Trussel. 2009. *A Predictive Model of Fiscal Distress in Local Governments*. *J. Of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 21 (4) 578-616.

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  
*Pemerintahan Daerah.*
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa.*
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 tentang  
*Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan  
Evaluasi Dana Desa*
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257 Tahun 2015 tentang  
*Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan  
Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi ADD yang Kemudian  
Dijabarkan Didalam Peraturan Bupati*
- Riahi, Ahmed. Belkaoui. 2006. *Accounting Theory-Teori Akuntansi Buku Satu  
Edisi Lima.* Salemba Empat. Jakarta
- Rustiyaningsih, Sri. Intan Immanuela. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  
Kinerja Pemerintah Daerah.*
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam  
Otonomi.* Ghalia Indonesia. Jakarta
- Sekaran, Uma. 2011. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis.* Salemba Empat.  
Jakarta
- Sjoberg, Peter. 2003. *Government Expenditure Effect on Economic Growth The  
Case Sweden 1960-2001.*
- Sumarjo, Hendro. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap  
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah  
Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia).*
- Sunaryo, Kunti. Abdul Ghofar. 2015. *Charasteristic Local Government and  
Performance: An Empirical Examination of Local Government in  
Indonesia.* Buletin Ekonomi
- Thoha, Miftah. 2008. *Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya.* Raja  
Grafindo Persada. Jakarta
- Warren, Carl S, et.al. 2014. *Pengantar Akuntansi : Adaptasi Indonesia.* Salemba  
Empat. Jakarta
- Watts, Ross L. Jerold L Zimmerman. 1986. *Positive Accounting Theory.* Prentice-  
Hall. USA
- Wenny, Cherrya Dhia. 2012. *Analisis Pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan  
pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.*

Widarjono, Agus. 2009. *Ekonometrika : Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis, Edisi Kedua*. Ekonisia FE Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta

World Bank. 2008. *Haiti, Public Expenditure Management and Financial Accountability Review. A World Bank Country Study*

**Sumber lain:**

[www.bpmpd.lampungprov.go.id](http://www.bpmpd.lampungprov.go.id)

[www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id](http://www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id)

[www.setjen.kemendes.go id](http://www.setjen.kemendes.go.id)

[www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id)

[www.lampung.bps.go id](http://www.lampung.bps.go id)

[www.seknasfitra.org](http://www.seknasfitra.org)